



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**JLN. ADI SUCIPTO NO. TELP/FAX (0385) 21418 RUTENG**

---

---

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MANGGARAI**

## Kata Pengantar

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai Pengendali Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Peran yang harus dikawal Dinas P2KB semakin menantang karena memberikan kontribusi dalam usaha menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). *Contraseptive Prevalenci Rate (CPR)*, adalah salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Dinas P2KB dalam usaha mengurangi angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate (TFR)* yang berpengaruh langsung terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai mendukung Visi Bupati Manggarai Periode 2022 – 2026, yaitu **“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”**

Dalam rangka Visi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah menetapkan sasaran yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2022, yaitu :

**Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**, dengan indikatornya:

- a. Menurunnya TFR dari 2,07 menjadi 2,00 pada Tahun 2026
- b. Meningkatnya Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dari 72,72 % menjadi 75,23 % di Tahun 2026
- c. Menurunnya unmet need dari 11,38 % menjadi 10,53 % pada Tahun 2026

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, Dinas P2KB melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan, dengan dukungan dana/ anggaran sebesar Rp. **7.558.120.170**.

Program – program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai

  
Yustina Juf, SKM., M.Kes  
Peningkat Tingkat I  
NIP. 19660205 199103 2 011

# Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Sistematika Penyajian .....	5
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026 .....	6
B. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target .....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	9
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja .....	11
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	11
C. Realisasi Keuangan .....	16
<b>Bab IV Penutup</b>	
A. Strategi Peningkatan Kinerja dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Manggarai.....	21
B. Uraian Strategis Pemecahan Masalah serta Langkah-langkah Antisipatif yang Diambil .....	22

## Ringkasan Eksekutif

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 ini adalah tingginya nilai capaian kinerja dari, TFR, Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Persentase Masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK, Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk, Persentase Keluarga Sejahtera dan Persentase PPKS yang aktif.

Selanjutnya, berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan adalah 108,23 %.

Indikator – indikator dari keempat sasaran DP2KB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)
I	TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1.1	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)	106,86
		1.2	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,6
		1.3	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	89,99
		1.4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)	58,05
		1.5	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	136,19
		1.6	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	95,31
		1.7	Persentase Keluarga Sejahtera	168,14
		1.8	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	100
<b>Rata – rata sasaran</b>				<b>104,27</b>
<b>Kategori</b>		<b>Memuaskan</b>		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, capaian indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai ada 2 (Dua) indikator yang nilainya di bawah 80 % dan 6 (Enam) indikator lainnya di atas 80 % dengan nilai capaian rata-rata 104,27 %.

**Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor :**

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Adanya penyuluhan dan KIE yang dilakukan secara intensif mengenai Keluarga Berencana;
  - b. Adanya upaya – upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD);
  - c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi;
  - d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok – pelosok;
  - e. Adanya pembinaan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

**Adapun hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:**

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun;
  - b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (Dua) anak;
  - c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi;
  - d. Keterlambatan ketersediaan stok alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB.

**Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurang berhasilan pencapaian sasaran yaitu :**

1. Langkah-langkah antisipatif, yaitu:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
  - b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
  - c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB.

2. Langkah-langkah korektif, yaitu:

Melakukan koordinasi dengan faskes – faskes mengenai ketersediaan Alokon KB, apabila ada permintaan alokon KB di DP2KB yang tidak bisa terpenuhi karena kehabisan stok.

Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp **10.286.594.669,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan/ program yang langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 8.192.455.597 dengan realisasi 7.222.101.002 atau 88,16 %, sedangkan untuk kegiatan/ program penunjang/ pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.094.139.072 dengan realisasinya Rp. 1.989.446.147 atau 99,27 %.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan mengendalikan tingkat kelahiran, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dan mewujudkan ketahanan keluarga.

Hasil capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai ditunjukkan pada Laporan Kinerja sesuai RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai 2022 – 2026. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

### **B. Data umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

#### 1. Dasar hukum berdirinya organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah **Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

#### 2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

a. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah: Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kesekretariatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan KB;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan KB;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Struktur organisasi

1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai berdasarkan **Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016** tentang: Perubahan atas **Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26 Tahun 2016** tentang: Tugas Pokok dan Fungsi unit Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai terdiri dari:

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan staf pelaksana.

2. Sumber Daya Manusia

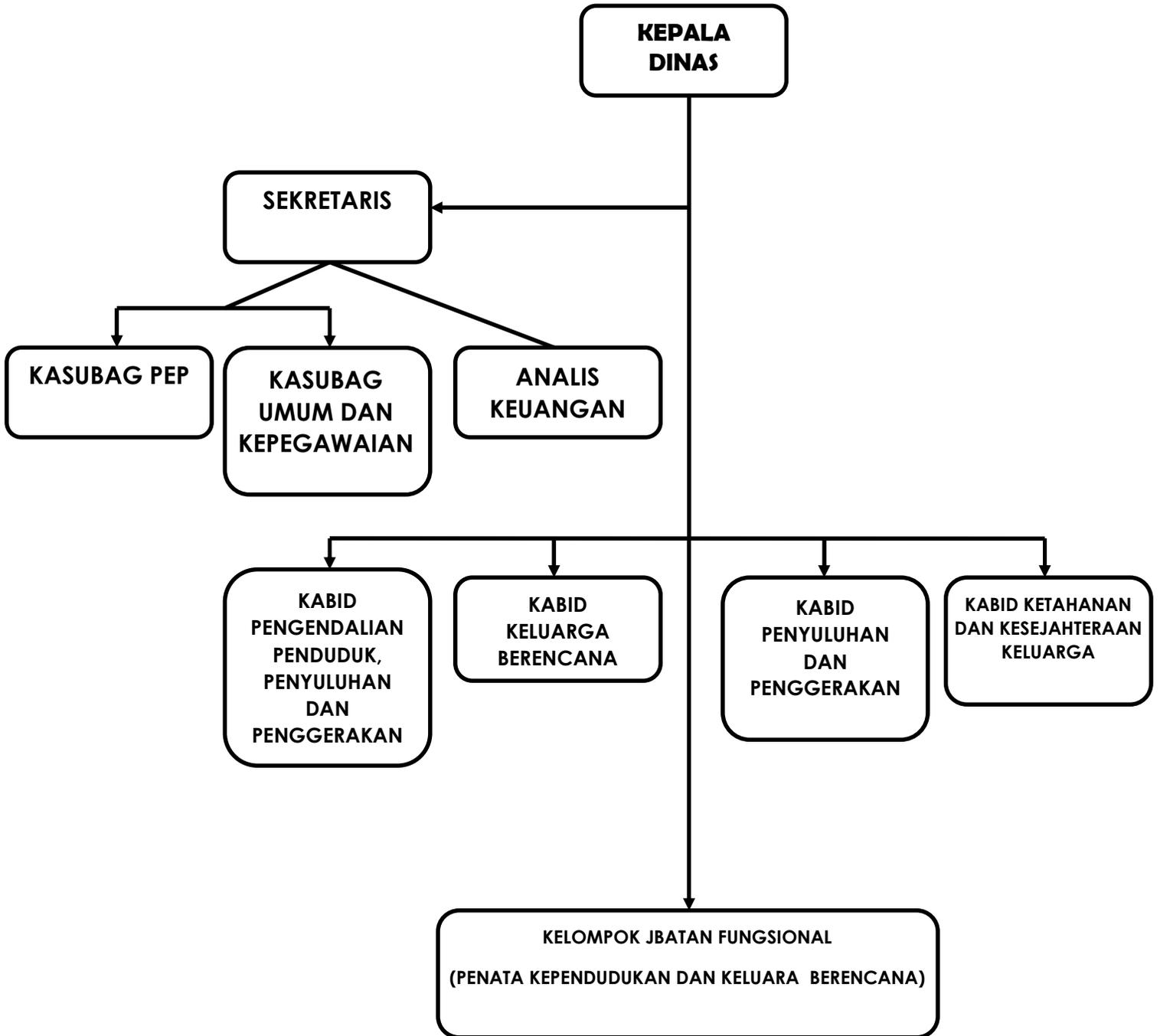
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)	Eselon	Ket.
1.	Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas	1	III-A	Terisi
2.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	1	III-B	Terisi
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	1	III-B	Terisi
4.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengerakan	1	III-B	Terisi
5.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	III-B	Terisi
6.	Kepala Sub Bagian	2	IV-a	Terisi
7.	Pejabat Fungsional	12	-	Terisi
8.	Staf PNS	3	-	Terisi
9.	Staf THL	6	-	Terisi
Total		28		

a. Susunan Kepegawaian menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas	1	-	-	-	1
3.	Kabid.	-	4	-	-	4
4.	Kasubag	-	1	1	-	2
5.	Pejabat fungsional	1	3	2	6	12
6.	Staf PNS	-	1	-	2	3
7.	Staf THL	1	1	-	4	6
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>28</b>

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MANGGARAI**



#### **D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2022 meliputi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 dan Perencanaan Kinerja Tahun 2022.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

##### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2021 – 2026**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 serta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang/urusan/Misi 1 (Satu) yaitu Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

#### **1. VISI**

Pernyataan Visi dan penjelasannya:

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021–2026 yaitu: **“Manggarai Yang Maju, Adil Dan Berdaya Saing”**

**a. Manggarai** memiliki makna

- 1) **Spasial** sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan

- 2) **Masyarakat beserta sosial budaya Manggarai** yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

b. **Maju** artinya

- 1) Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
- 2) Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
- 3) Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. **Adil** artinya

- 1) Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.
- 3) Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
- 4) Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.

- 5) Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.

d. **Berdaya saing** artinya

- 1) Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.
- 2) Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
- 3) Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat

## 2. MISI

Pernyataan Misi dan penjelasannya

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai sejalan dengan Misi 1 dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Periode 2021 – 2026, yaitu :

- a. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM)

### 3. TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RPJMD 2021 – 2026

#### TUJUAN

#### SASARAN

Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

#### B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Berdasarkan tujuan di atas selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam sasaran strategis yang hendak dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Disamping itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi dengan target-target realisasi setiap tahunnya.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2022 – 2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

#### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.1 : Sasaran strategis, indikator kinerja dan target

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1.1	Angka Kelahiran Total atau Tptal Fertility Rate (TFR)	Per Wanita Usia Subur	2,042	IKU
		1.2	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	45,35	Indikator Kinerja Program
		1.3	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,72	Indikator Kinerja Program
		1.4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,04	Indikator Kinerja Program
		1.5	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	%	2,75	Indikator Kinerja Program
		1.6	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	4,88	Indikator Kinerja Program
		1.7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	29,82	Indikator
		1.8	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	%	16,67	Indikator Kinerja Program

Untuk mencapai target indikator kinerja, tentu saja ada program yang diperlukan untuk mendorong capaian indikator kinerja. Program yang dilaksanakan DP2KB Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2022 adalah sbb :

Tabel 2.2 : Rincian Program dan Anggaran DP2KB Kab. Manggarai TA 2022

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.094.139.072	DAU
2.	Program Pengendalian Penduduk	258.660.000	DAU + DAK NON FISIK
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.045.835.597	DAU + DAK FISIK + DAK NON FISIK
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.887.960.000	DAU + DAK NON FISIK
<b>Total</b>		<b>10.286.594.669</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2023 untuk mencapai sasaran.

Berikut kami sajikan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran DP2KB Kabupaten Manggarai Tahun 2023.

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (TPP)	104,27	Memuaskan

#### **B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Adapun pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Sasaran : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana dikendalikannya LPP di Kabupaten Manggarai. Untuk mendukung pencapaiannya, maka disusun program pendukung, disediakan fasilitas seperti Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan, alat dan obat kontrasepsi, mobil pelayanan KB keliling, kendaraan dinas roda 2 bagi PKB; SDM (PKB/PLKB dan PPKBD) dan dana. Pada tahun 2023, kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **104,27 %**.

Dalam upaya mencapai sasaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menetapkan 3 (tiga) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Penyerapan anggaran tahun 2022 dari belanja langsung, untuk mencapai sasaran ini adalah Rp. 9.211.547.149 dari total anggaran sebesar Rp. 10.286.594.669 dengan persentase pencapaian/penyerapan anggaran sebesar 89,55,98 %. Adapun indikator untuk mencapai sasaran terdiri dari 8 indikator. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI		
1	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)	Per Wanita Usia	2,042	1,90	106,86	IKU
2	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	45,35	36,10	79,6	Indikator Kinerja Program
3	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,72	66,34	89,99	Indikator Kinerja Program
4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,04	15,67	58,05	Indikator Kinerja Program
5	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	2,75	3,75	136,19	Indikator Kinerja Program
6	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	4,88	4,65	95,31	Indikator Kinerja Program
7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	29,82	50,14	168,14	Indikator Kinerja Program
8	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	%	16,67	16,67	100	Indikator Kinerja Program

Dari 8 (delapan) indikator pada tabel 3.2, satu indikator yaitu TFR merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, sedangkan tujuh indikator lainnya adalah Indikator Kinerja Program. Dari indikator-indikator pada tabel 3.2 di atas, terdapat indikator – indikator yang realisasinya diharapkan semakin menurun dan terdapat juga indikator – indikator yang diharapkan nilainya semakin meningkat.

Indikator – indikator yang realisasinya diharapkan menurun adalah:

1. Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
2. Persentase cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)

Untuk indikator – indikator tersebut, rumus untuk memperoleh nilai capaiannya adalah

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

*atau*

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kedua rumus di atas akan menghasilkan nilai capain yang sama.

Sementara itu, Indikator – indikator yang realisasinya diharapkan meningkat adalah Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR).

Untuk indikator – indikator tersebut, rumus untuk memperoleh nilai capaiannya adalah

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Taraet}} \times 100 \%$$

Dari delapan indikator pada tabel 3. 2, dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator kinerja “**Angka Kelahiran Total (TFR)**”. Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap wanita usia subur hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara mencari rata-rata ASFR (Age Specific Fertility Rate) dari 7 (Tujuh Kelompok Umur), lalu dikali 5 dan dibagi 1000. Total Fertility Rate pada Tahun 2023 adalah 1,90 dari target 2,042.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini =

$$\frac{2,042 - (1,90 - 2,042)}{2.042} \times 100\% = 106,86 \%$$

2. Indikator kinerja "**Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**", realisasinya 36,10 % (yang artinya dari 100 peserta KB aktif, sebanyak 36 sampai 37 orang menggunakan MKJP seperti IUD, Implan, MOW dan MOP), dari target 45,35 %. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif MKJP (12.274) dibagi jumlah peserta KB aktif (34.003) dikali 100%".

Realisasi indikator ini diharapkan semakin meningkat, maka capaian kinerja indikator ini :  $36,10/45,35 \times 100 \% = 79,60 \%$ .

3. Indikator kinerja "**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)**" realisasinya 66,34 (yang artinya terdapat 66 sampai 67 akseptor KB per 100 pasangan usia subur), dari target 73,72 %. Nilai realisasi ini diperoleh dari "Jumlah peserta KB aktif (34.003) dibagi jumlah PUS riil (51.253) dikali 100 %".

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini =  $66,34 / 73,72 \times 100 \% = 89,99 \%$ .

4. Indikator kinerja "**Persentase sasaran PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)**", realisasinya 15,67 % (yang artinya terdapat 15 sampai 16 orang yang ingin menunda kehamilan dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, dari 100 pasangan usia subur) dari target 11,04 %. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah PUS tak ber-KB yaitu PUS yang ingin anak tapi ditunda (IAT) dan PUS yang tidak ingin anak lagi (TIAL) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 8.032 PUS dibagi total PUS riil (51.253) dikali 100 %".

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini :

$$\frac{11,04 - (15,67 - 11,04)}{11,04} \times 100 \% = 58,05 \%$$

5. Indikator kinerja "**Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)**", realisasinya 3,75 % (yang artinya terdapat 3 sampai 4 orang yang tersosialisasi dari setiap 100 orang) dari target 2,75 %. Angka realisasinya diperoleh dari "Jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi

program Bangga Kencana (12.499) dibagi total jumlah masyarakat (333.730) dikali 100 %.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini =  $3,75 / 2,75 \times 100 \% = 136,19 \%$ .

6. Indikator kinerja "**Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**", realisasinya 4,65 % dari target 4,88 %. Angka realisasi ini diperoleh dari "Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (2 OPD) dibagi jumlah total perangkat daerah (43 OPD) dikali 100 %.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini =  $4,65 / 4,88 \times 100 \% = 95,31 \%$ .

7. Indikator kinerja "**Persentase Keluarga Sejahtera**". Untuk menghitung realisasi indikator ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki data pasti berapa jumlah keluarga sejahtera dan tidak sejahtera. Dalam perhitungan ini, Dinas P2KB, menggunakan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2023. Dari total 23.166 KRS, terdapat 11.618 keluarga yang masuk kategori peringkat kesejahteraan 4 dan 4+. Jumlah keluarga sejahtera 4 dan 4+ tersebut yang kami jadikan sebagai pembilang dan total KRS sebagai penyebut. Realisasinya 50,15 % (yang artinya terdapat 50 sampai 51 keluarga sejahtera dari setiap 100 keluarga) dari target 29,82 %.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini =  $50,15 / 29,82 \times 100 \% = 168,14 \%$

8. Indikator kinerja "**Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan yang aktif**", realisasinya 16,67 % dari target 16,67 %. Angka realisasi ini diperoleh dari jumlah PPKS yang aktif (2 Kelompok) dibagi jumlah Kecamatan (12 Kecamatan).

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat, maka capaian kinerja indikator ini =  $16,67 / 16,67 \times 100 \% = 100 \%$

### C. REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.286.594.669,- dengan rincian sbb:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Keuangan DP2KB Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.009.676.186,</b>	<b>8.934.628.666,-</b>	<b>89,26</b>
	Belanja Pegawai	1.811.707.100,-	1.738.687.125,-	95,97
	Belanja Barang dan Jasa	8.197.969.086,-	7.195.941.541,-	87,78
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>276.918.483,-</b>	<b>276.918.483,-</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.918.483,-	276.918.483,-	100
	<b>TOTAL</b>	<b>10.286.594.669,-</b>	<b>9.211.547.149,-</b>	<b>89,55</b>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 9.211.547.149,- atau 89,55%. Dari total anggaran sebesar Rp 10.286.594.669,-.

Kami sajikan anggaran dan realisasi per kegiatan yang secara langsung mendukung sasaran strategis Dinas P2KB Tahun 2023 pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.094.139.072</b>	<b>1.989.446.147</b>	<b>95,00</b>
<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>100</b>
1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.pdf	1.002.000	1.002.000	100
2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.002.000	1.002.000	100
<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.892.489.072</b>	<b>1.817.309.385</b>	<b>96,027</b>
3). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.779.457.100	1.707.887.125	95,978
4). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.450.000	35.000.000	96,022
5). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	76.581.972	74.422.260	97,18

	<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>57.014.000</b>	<b>55.909.400</b>	<b>98,063</b>
	6). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.243.600	15.243.600	100
	7). Penyediaan Bahan-Material	21.170.400	20.575.000	97,188
	8). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.600.000	20.090.800	97,528
	<b>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.032.000</b>	<b>18.690.878</b>	<b>54,921</b>
	9). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100
	10). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000	16.578.878	53,137
	11). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.232.000	1.512.000	67,742
	<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.600.000</b>	<b>95.532.484</b>	<b>87,967</b>
	12). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.600.000	90.532.484	87,387
	13). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>258.660.000</b>	<b>250.178.800</b>	<b>96,721</b>
	<b>1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>258.660.000</b>	<b>250.178.800</b>	<b>96,721</b>
	14). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.500.000	96.050.000	95,572
	15). Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	112.800.000	112.800.000	100
	16). Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.360.000	41.328.800	91,113
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.045.835.597</b>	<b>5.530.702.202</b>	<b>91,48</b>
	<b>1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.007.400.000</b>	<b>838.302.000</b>	<b>83,214</b>
	17). Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang	65.200.000	65.198.000	99,997
	18). Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	276.000.000	136.120.000	49,319
	19). Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	587.400.000	568.354.000	96,758
	20). Pengendalian program KKBPK	78.800.000	68.630.000	87,094

	<b>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>660.901.972</b>	<b>658.542.260</b>	<b>99,643</b>
	21). Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	52.000.000	52.000.000	100
	22). Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	95.901.972	93.542.260	97,539
	23). Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	513.000.000	513.000.000	100
	<b>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.155.333.625</b>	<b>3.094.987.942</b>	<b>98,088</b>
	24). Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	34.500.000	34.500.000	100
	25). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.075.073.500	1.054.140.317	98,053
	26). Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.006.602.625	2.006.347.625	99,987
	27). Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	39.157.500	-	-
	<b>4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.222.200.000</b>	<b>938.870.000</b>	<b>76,818</b>
	28). Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.222.200.000	938.870.000	76,818
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.887.960.000</b>	<b>1.441.220.000</b>	<b>76,337</b>
	<b>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.887.960.000</b>	<b>1.441.220.000</b>	<b>76,337</b>
	29). Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	235.200.000	65,333
	30). Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.527.960.000	1.206.020.000	78,93
		<b>10.286.594.669</b>	<b>9.211.547.149</b>	<b>89,55</b>

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan anggaran Berdasarkan Capaian Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis	% rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran Program Strategis			Keterangan
		Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	104,27	10.286.594.669	9.211.547.149	89,55	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah 104,27 dengan kategori memuaskan dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi yaitu 89,55 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas P2KB pada TA 2023, berbanding lurus dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesertaan masyarakat untuk mengikuti Program Bangga Kencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2023 menyajikan capaian yang nilainya di atas 100 %. Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas P2KB adalah 104,27 %. Dari total delapan indikator kinerja DP2KB Tahun 2023, 6 (enam) capaian Indikatornya di atas 80 %, yaitu

- a. Total fertility Rate capaiannya 106,86 % ;
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern capaiannya 89,99 % ;
- c. Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) capaiannya 136,19 % ;
- d. Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk capaiannya 95,31% ;
- e. Persentase keluarga sejahtera capaiannya 168,14 % ;
- f. Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif capaiannya 100 % ;

Adapun 2 (dua) indikator yang capaiannya di bawah 80 % adalah

- a. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) capaiannya 79,6 ;
- b. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need) capaiannya 58,06 % ;

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja tahun 2023.

**Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor :**

- a. Adanya penyuluhan dan KIE yang dilakukan secara intensif mengenai Keluarga Berencana;
- b. Adanya upaya – upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD);
- c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi;
- d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok – pelosok.
- e. Adanya pelatihan tenaga pelayanan kontrasepsi.

**Adapun hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran adalah sebagai berikut :**

- a. Masih rendahnya pengetahuan generasi muda mengenai Keluarga Berencana dan Generasi Berencana;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun;
- c. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar agar memiliki 2 (Dua) anak;
- d. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi;
- e. Alat kontrasepsi yang diminati masyarakat yang hendak memasang kontrasepsi habis stok.

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka DP2KB telah menerapkan beberapa strategi untuk peningkatan kinerja dan langkah-langkah antisipatif untuk pemecahan beberapa masalah yang ada.

**A. Strategi Peningkatan Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah:**

- a. Peningkatan Peranserta Institusi Masyarakat terutama kader seperti PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Pendamping Keluarga (TPK);
- b. Pembinaan Keluarga Berencana bagi keluarga-keluarga;

- c. Pelayanan Kontrasepsi jangka panjang gratis;
- d. Pembinaan Ketahanan Keluarga bagi calon pengantin dan keluarga muda.

**B. Uraian Strategis Pemecahan Masalah serta langkah-langkah antisipatif yang diambil**

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kurang berhasil pencapaian sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan penyuluhan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko menikah dan melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi;
- c. Meningkatkan kapasitas kader kelompok ina Keluarga Balita, agar semakin banyak peserta Poktan BKB yang menjadi peserta/akseptor KB.

**Langkah-langkah korektif, yaitu:**

Melakukan koordinasi dengan faskes – faskes mengenai ketersediaan Alokon KB, apabila ada permintaan alokon KB di DP2KB yang tidak bisa terpenuhi karena kehabisan stok.

Ruteng, 17 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai,



**YUSTINA JUT, SKM., M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660205 199103 2 011